

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki & Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andriani, R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)*. Jurnal Akuntansi.
- Badan Pusat Statistik. *Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota* <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928>, diakses tanggal 18 Agustus 2021.
- Baihaqi. (2011). *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Akuntansi, 1 (3) 2011. Universitas Bengkulu.
- Dharma, Esa, G. P., & Suardana, A. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya Vol.6 No.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2018). *“Pajak Daerah”*. Tersedia [Online]. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf) Diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.
- Erawati, Nyoman Trisna dan Leny Suzan. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Survei Pada Dpkad Kota Bandung Periode 2009-2013)*. *e-Proceeding of Management*, 4.
- Febriyanti, Feni dan Muhammad Faris. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat
- Juhariah, Lia., & P, Dematria. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*.

- Kristina, Siti Raun, dkk. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal EMBA.*
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mariyanto, J. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi.*
- Mea, Frangky Martinus, dkk. (2017). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa. Agri-SosioEkonomiUnsrat.*
- Nggilu, Fadly D. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2.*
- Novalistia, R. L. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Accounting, 2.*
- Novitasari, Maya dan Lita Novitasari. (2019). *Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Akuntansi, 4.*
- Puspitasari, Arum dan Naila Rizki Salisa. (2017). *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016). ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL.*
- Putra, Rico dan Surya Hidayat. (2016). *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan . Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan.*
- Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). e-Proceeding of Management.*
- S, M. Zahari M. (2016). *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Eksis.*

- Sanga, Konstatinus Pati, dkk. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. ACCOUNTING UNIPA.*
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Mulkan Teguh dan Arif Santoso. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. Majalah Inspiratif,* 3.
- Tangkilisan, H. N. (2017). *Manajemen Publik.* Jakarta: PT. Grasindo.
- Tolosang, K. D. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi,* 4.
- Wahyuningsih, P. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015). JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis),* 4.
- Wildan, Muhammad. (2021). *Bank Indonesia Sebut Elektronifikasi Pajak Daerah Sudah Mencapai 82%.* DDTC News: [https://news.ddtc.co.id/bank-indonesia-sebut-elektronifikasi-pajak-daerah-sudah-capai-82-29548?page\\_y=25](https://news.ddtc.co.id/bank-indonesia-sebut-elektronifikasi-pajak-daerah-sudah-capai-82-29548?page_y=25). Diakses Tanggal 17 Agustus 2021.
- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja